ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 11, Nomor 1, Februari 2022: 90 - 105
10.33772/etnoreflika.v11i1.1532

ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

ANALISIS MODEL PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT: SUATU PENDEKATAN EMPIRIS DI WANGI-WANGI, WAKATOBI

AN ANALYSIS OF COMMUNITY-BASED TOURISM MODEL: AN EMPIRICAL APPROACH IN WANGI-WANGI, WAKATOBI

La Ode Aris[1], Heddy Shry Ahimsa-Putra[2], Pande Made Kutanegara[3]

[1]Mahasiswa Program S3 Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Jl. Nusantara No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia
[2,3]Program S3 Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Email korespondensi: arislaode76@gmail.com

Diterima: 3 Januari 2022; Direvisi: 20 Februari 2022; Disetujui: 23 Februari 2022

Copyright © 2022 The Author
This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

How to cite (APA): Aris, L. O., Ahimsa-Putra, H. S., & Kutanegara, P. M. (2022). Analisis model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat: Suatu pendekatan empiris di Wangi-Wangi, Wakatobi. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, *11*(1), 90–105. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i1.1532

ABSTRACT

Community-based tourism (CBT) is one of the management models adopted by the Wakatobi Regency government in managing tourism. This paper examines the management of community-based tourism in Wangi-Wangi Island, Wakatobi Regency from 2006 to 2019 Data were obtained from various literatures by conducting literature studies and from field observations and interviews with the community. Meanwhile, the data analysis technique used was a qualitative data analysis with CBT perspective. The results of this study indicate that the CBT model is carried out in two types: (1) tourism management is carried out by landowners in which local community is not directly involved in the management of object; (2) tourism management is carried out by the government, in which the local community is directly involved in managing the tourist objects. The supervision of CBT model management is carried out by the government along with the community involved in tourist objects. The local community can feel directly the benefit of CBT model, either directly or indirectly involved.

Keywords: *model, management, tourism, community-based, government, Wangi-Wangi Island.*

ABSTRAK

C*ommunity-based tourism* (CBT) adalah salah satu model pengelolaan yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mengelola pariwisata. Tulisan ini mengkaji pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Tahun 2006-2019. Data diperoleh dari berbagai literatur dengan melakukan studi pustaka dan diperoleh dari pengamatan di lapangan dan wawancara kepada masyarakat. Sementara, teknik analisis data adalah analisis data kualitatif, sementara untuk menganalisa data sesuai dengan permasalahan penelitian menggunanakan perspektif CBT. Hasil penelitian ini bahwa model CBT dilakukan dalam dua tipe, yakni (1) pengelolaan pariwisata dilakukan oleh pemilik lahan. Dengan tipe ini masyarakat setempat tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan obyek; (2) pengelolaan pariwisata dilakukan oleh pemerintah. Dalam pengelolaan pariwisata masyarakat setempat terlibat langsung dalam mengelolaan obyek wisata. Pengawasan pengelolaan model CBT dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yang telibat dalam obyek wisata. Manfaat yang diperoleh masyarakat setempat dengan model CBT dapat dirasakan langsung hasilnya, baik yang terlibat langsung maupun tidak.

Kata kunci: Model, pengelolaan, pariwisata, berbasis masyarakat, pemerintah, Pulau Wangi-Wangi.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat menitikberatkan pada partisipasi masyarakat atau komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan program (Bello et al., 2016). Diikutkannya masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata merupakan inti keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan (Thetsane, 2019). Konsep pembangunan berkelanjutan rupanya telah diadopsi untuk pengelolaan pariwisata. Secara umum pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan, kebutuhan dasar manusia terpenuhi, peluang-peluang lapangan kerja terbuka, keadilan dapat dikurangi dan masyarakat setempat dapat menentukan nasibnya sendiri (Picard, 2016). Sementara menurut Violetta Simatupang (2021), tiga prisip dasar dalam pembangunan berkelanjutan, yakni lingkungan ekologis dan sosial budaya dapat survaif, serta generasi mendatang mendapatkan kepastian hidup dengan adanya perbaikan pembangunan ekonomi.

Selanjutnya, *Word Tourism Organization* (WTO) dalam agendanya pada pembangunan pariwisata menfokuskan pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan peluang dimasa yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan di daerah tujuan wisata. Sementara menurut Pitana dalam, Diarta (2013) Dalam pembangunan pariwisata yang berlanjutan yang harus diperhatikan adalah perekonomian tumbuh dengan baik, masyarakat setempat yang sejahtera, struktur alam tidak dirubah, kebudayaan yang dinamis dan wisatawan mendapatkan pelayanan yang maksimal karena perhatian dan kepeduliaannya terhadap lingkungan sangat tinggi. Sementara Erdigton dan Smith dalam (Nasikun, 2011) menyatakan adanya kepuasan positif baik itu dari masyarakat dan wisatawan ketika berinteraksi dan bertukar pengamalan serta menunjukan konsistensinya pada sosial, alam dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat merupakan ciri khas dari pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sementara, menurut Smith, (2001) bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah adanya partisipasi dari berbagai lembaga dan masyarakat mengenai keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata agar tercapai pembangunan pa-

riwisata yang berkelanjutan juga dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Begitupun juga Kabupaten Wakatobi yang terletak di Sulawesi Tenggara yakni daerah dengan 97 persen wilayah laut dengan keindahan alam laut dan surga bawah laut serta keunikan budayanya sehingga menjadikannya sebagai ikon pariwisata di Sulawesi Tenggara, bahkan masuk dalam salah satu destinasi pariwisata unggulan yang menjadi salah satu tujuan utama wisatawan di Indonesia (Hadiyat, 2014 ; Kurniasari et al., 2018 ; Asuhadi et al., 2021). Sejak pertama kali dibuka, pariwisata di Kabupaten Wakatobi, khususnya di Pulau Wangi-Wangi telah menerapkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Lingkungan ekologis yang berkelanjutan, kebutuhan primer manusia terpenuhi, lapangan kerja tersedia bagi generasi yang akan datang dan masyarakat setempat dapat menentukan nasipnya sendiri merupakan inti dari konsep pembangunan berkelanjutan. (Smith, 2001 ; Nasikun, 2011; Diarta, 2013; Picard, 2016; Violetta Simatupang, 2021), bahkan dalam perjalannya telah mengadopsi pendekatan pembangunan ekonomi hijau. Pendekatan pariwisata yang berorientasi pada ekonomi hijau adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dengan meminimalisir dampak negatif pada ekologi dan lingkungan hidup (A. Law et al., 2012; Holden, 2013; Paunovic, 2015; Loiseau et al., 2016; Pan et al., 2018). Kedua konsep ini pada prinsipnya menekankan adanya pengelolaan pariwisata berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan dapat meminimalisir kerusakan pada lingkungan hidup.

Untuk itu, itu salah satu model yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam pengelolaan pariwisata adalah melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata atau *community-based tourism management*. Dalam pengelolaan pariwisata masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan sampai pada pengelolaan obyek wisata. Berbagai tempat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, seperti pengelolaan wisata di Taman Nasional Sagarmatha di Himalaya, Nepal, dengan model *community based tourism* (CBT), yakni warga lokal terlibat langsung dalam program reboisasi yang dikendalikan oleh manajemen lokal dalam obyek wisata (Jefferies, 1982). Penelitian, Steinicke & Neuburger, (2012) di Pegunungan Alpine di wilayah Gunung Kenya, bahwa pengelolaan pariwisata dengan model CBT, dapat menstabilkan pendapatan rumah tangga pedesaan, menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kerentanan keluarga. Selanjutnya, dengan model CBT di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul, bahwa baik dari masyarakat lokal, pemerintah setempat, lembaga sosial kemasyarakatan seperti Pokdarwis, Ketua RT, Karang Taruna terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata (Dewanti, 2014). Selanjutnya, model CBT yang dilakukan di Pulau Nusa Penida, Bali memperlihatkan bahwa (1) pengelolaan wisata bahari lebih banyak dilakukan oleh investor karena keterlibatan stakeholdes sangat minim yang mengesampingan kepentibgan masyarakat sekitar, sementara para pengusaha lebih pada *profit oriented*; (2) karena didominasi oleh investor dari luar, maka peran serta masyarakat sangat terbatas, sehingga model CBT belum sepenuhnya berhasil (Darsana, 2017). Sementara seperti yang dilaporkan oleh (Ramadhani, 2017) bahwa model CBT dalam pengelolaan wisata air terjun Tumpuk Sewu, Lumajang, dimana proses pengelolaan dengan melibatkan masyarakat setempat telah berjalan dengan baik. Mereka dilibatkan dalam perencanaan, penetapan program, sampai pada pembentukan Pokdarwis.

Selanjutnya, temuan Purnaya (2017), bahwa pengelolaan obyek wisata Alas Kedaton dengan model CBT, bahwa masyarakat setempat telah berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat setempat dilibatkan dalam pengelolaan daya tarik wisata, kemudahan wisatawan dan berbagai sarana ako-

modasi dalam obyek wisata. Selanjutnya, hasil penelitian Ariyani, (2019) dengan model *model community based tourism* (CBT), yakni di Pantai Bangsring, Banyuwangi, yakni wisata ikan hias dimana masyarakat dapat mengelola pantai dengan baik, mengedukasi setiap pengunjung yang ingin mengetahui menganai proses perawatan dan pelestarian biota laut. Sementara, pengelolaan wisata Tretes Taman Tani di Desa Kemiran, Selo, Bayolali, dengan model CBT yaitu keterlibatan pemerintah, pemilik lahan, dan masyarakat setempat serta karang taruna, Partisipasi masyarakat dan karang taruna ditunjukan dengan keaktifan mereka yang ikut serta mengurus tempat parkir, loket masuk, mengelola aula serta kantin. Masyarakat diberikan peran yang lebih besar oleh pemerintah yang merupakan fasilitator dalam program ini (Nuning Lisdiana, 2019). Selanjutnya, hasil penelitian (Delvi, 2020), mengenai pengelolaan wisata permandian alam Batang Tabik, di Nagari Sei, Kamuyang, dengan model CBT. Sistem Jarong dalam pengelolaan dimana masing-masing Jarong berkesempatan untuk mengelola obyek wisata dengan cara diundi. Yang keluar Namanya itulah yang melaksanakan pengelolaan. Bagi jarong yang mengelola diwajibkaan membayat kepada Nagari sebanyak 45 juta. Pembayaran ini diambil dari hasil penjualan tiket dari para wisatawan. Berbagai tulisan di atas membahas tentang CBT di berbagai tempat, sementara dalam tulisan ini membahas lebih jauh tentang penerapan CBT di Wakatobi yakni di Wangi-Wangi, Sulawesi Tenggara.

Representasi Teori

Pengelolaan model *community-based tourism* (CBT) adalah suatu pola atau model untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan cara memperhatikan dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan budaya masyarakat (Suansri, 2003). Sementara menurut pendapat Hausler (dalam Herdiana, 2019) Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata merupakan inti dari CBT, baik langsung maupun tidak. Dalam hal ini model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat erat kaitannya dengan keikutsertaan masyarakat didalamnya. Dua hal keterlibatan masyarakat dalam CBT, yakni (1) dalam proses mengambilan keputusan; (2) yang berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari CBT (Timothy, (1999). Sementara menurut Mayaka et al., (2019) bahwa keikutsertaan masyakat dalam pengelolaan pariwisata salah satu yang terpenting adalah kekuatan dan kontrol komunitas dalam CBT. Sementara menurut Bittar Rodrigues & Prideaux, (2018) bahwa model CBT dalam pengelolaan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penetapan pulau Wangi-wangi sebagai lokasi penelitian karena pariwiasatanya telah lama dikelola. Sementara metode pengumpulan data yaitu sekunder dan primer. Metode pertama diperoleh langsung dari pengamatan dan wawacancara selama berada di lokasi penelitian, sementara metode kedua diperoleh melalui studi literatur, yakni melalui buku, jurnal, disertasi dan tesis, terkait dengan tema penelitian yaitu model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Teknik pengamatan dipakai untuk mengamati langsung keberadaan sumber daya alam berupa kondisi obyek wisata, dan tempat-tempat obyek wisata lainnya sehingga memperoleh gambaran tentang keberadaan dan kondisi setiap obyek wisata yang ada di Pulau Wangi-Wangi. Pengamatan juga dilakukan di berbagai lembaga pariwisata atau para pengelola obyek wisata, yaitu dalam hal mempersiapkan prodak pariwisata, pelayanan kepada para wisatawan, perawatan obyek wisata, keamanan obyek wisata dan lain

sebagainya. Dengan kata lain bahwa pengamatan terkait dengan praktik, tindakan dan aktivitas aktor manusia (Nimmo, 2011), yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata. Peneliti juga melakukan pengamatan diberbagai tempat, seperti, café, tempat hiburan dan lain sebagainya. Semua kejadian tersebut dicatat dan direkam, walapun itu tidak mungkin lengkap atau sesempurna seperti apa yang dibayangkan (Dann et al., 1988). Wawancara mendalam dilakukan kepada para informan terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada para pengelola obyek wisata untuk mendapatkan data berkaitan dengan model CBT, promosi pariwisata, penjualan produk wisata, keamanan pengunjung dalam obyek wisata, strategi pemasaran, penjualan paket-paket wisata dan lain sebagainya, Selanjutnya, para informan menggambarkan sesuatu hal terkait dengan pariwisata, mendefinisikan, bagaimana jaringan aktor dalam mengelola pariwisata (Ren, 2010; Ren, C., Jóhannesson, G. T., & van der Duim, 2012 ; Beard, Scarles, & Tribe, 2016).

Selanjutnya, analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Menurut, Ahimsa-Putra, (2016 : 36), bahwa analisis data kualitatif adalah "cara-cara untuk memilah-milah, mengelompokkan data kualitatif agar kemudian dapat dilakukan interpretasi dan ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan kategori data yang lain". Untuk itu, untuk nengalisa data tentang model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat menggunakan perspektif *community-based tourism model*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengelolaan Pariwisata berbasis Masyarakat di Wangi-Wangi, Wakatobi

Salah Satu model pengelolaan pariwisata yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi di Pulau Wangi-Wangi dalam pengelolaan obyek wisata adalah model *community-based tourism* (CBT). Model CBT dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup dan budaya lokal yang berkelanjutan Giampiccoli & Kalis, 2012; Sumarni et al., 2020; Giampiccoli et al., 2020). Pengelolaan pariwisata dengan model CBT erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, pengawasan, dan hasil atau manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya CBT (Vafadari, 2008 ; Timothy, 1999 ; Mayaka et al., 2019). Senada dengan pendapat Hausler (dalam Herdiana, 2019) bahwa baik langsung maupun tidak keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata merupakan poin penting dalam CBT. Dalam hal ini model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat erat kaitannya dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, berbagai nilai tambah dengan adanya model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, yakni (1) masyarakat berperan sebagai pelaku, mereka dapat menyediakan berbagai hal untuk wisatawan seperti, tempat tinggal, menyediakan makan dan minum, jasa *laundry*, jasa angkutan umum dan lain sebagainya; (2) Kelangsungan usaha lokal dapat berkembang seiring dengan meningkatnya konsumsi wisatawan. Produk lokal dapat berupa kuliner lokal, kerajinan tangan, dan berbagai jenis hasil pertanian seperti buah dan sayuran; (3) Terbukanya berbagai peluang kerja seperti dapat bekerja sebagai karyawan hotel, *tour dive*, dan berbagai seni kerajinan; (4) Nilai-nilai tradisi, keunikan alam dan budaya lokal terangkat kepermukaan seiring dengan kesadaran masyarakat untuk melestarikannya (Pantiyasa, 2018). Berbagai pendapat tersebut memperlihatkan bahwa model pengelolaan pariwisata dengan model CBT adalah menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat setempat dalam

pengelolaan pariwisata sehingga dapat memperoleh manfaat dari model pengelolaan tersebut.

Selanjutnya, sejak pertama dibuka pariwisata di Pulau Wangi-Wangi yaitu pada tahun 2006 masyarakat setempat telah mengambil bagian di dalamnya. Ini memungkinkan karena arah kebijakan pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam pengelolaan pariwisata adalah partisipasi aktif masyarakat atau masyarakat setempat dengan cara dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Wakatobi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah 2016-2025, Pasal 6 huruf e, bahwa "Pembangunan Kepariwisataan berbasis Masyarakat". Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) ini bahwa prinsip pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wakatobi, khusnya di Pulau Wangi-Wangi bahwa dalam pengelolaan melibatkan masyarakat setempat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Kebijakan ini pula sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, khususnya pada Pasal 5, huruf c bahwa pariwisata dapat " memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas. Selanjutnya, di bawah ini akan dibahas tentang keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, pengawasan dalam obyek wisata dan manfaat yang diperoleh masyarakat setempat dengan adanya pengelolaan pariwisata bebasis masyarakat.

Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah dengan Model CBT

Pengelolaan pariwisata di Pulau Wangi-Wangi dilakukan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Masyarakat setempat dilibatkan agar mereka dapat menjaga obyek wisata, ketertiban, keamanan dan melayani kepentingan wisatawan. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata agar tercapai pengelolaan, lingkungan dan budaya yang berkelanjutan. Sementara keterlibatan pemerintah dapat menyediakakan berbagai sarana dan prasarana obyek wisata dan regulasi terkait dengan keperawisataan. Ada dua tipe pengelolaan pariwisata dengan model CBT di Pulau Wangi-Wangi, yakni (1) tipe pengelolaan obyek wisata oleh pemilik lahan; dan (2) tipe pengelolaan obyek wisata oleh pemerintah.

Tipe Pengelolaan Obyek Wisata oleh Pemilik Lahan

Berbagai obyek wisata di Pulau Wangi-Wangi sebagian besar milik masyarakat setempat. Untuk itu dalam pengelolaannya sesuai dengan keinginan pemilik lahan. Walaupun demikian dalam pengelola obyek wisata tetap berpedoman pada peraturan yang ada sehingga dalam pelaksanannya mengikuti petunjuk dari pemerintah. Sebelum lebih jauh membahas tentang pengelolaan obyek wisata oleh pemilik lahan, terlebih dahulu diketengahkan tentang kebijakan pemerintah tentang hal ini. Pada awalnya ketika pariwisata dibuka pada tahun 2006 oleh bupati Hugua masyarakat yang bermukim di sekitar obyek wisata terlibat langsung dalam pengelolaan obyek wisata, maka mereka disibukkan untuk menjaga obyek wisata dan melayani kepentingan wisatawan, tetapi ketika obyek-obyek wisata tersebut diambil alih oleh pemilik lahan maka pengelolaan berpindah tangan dari masyarakat setempat ke pemilik lahan. Masyarakat sekitar yang awalnya terlibat langsung dalam pengelolaan obyek wisata, kemudian dilarang oleh pemilik lahan untuk melakukan berbagai usaha di dalamnya. Apabila mereka ikut membuka usaha dalam obyek wisata harus seijin pemilik lahan atau mengontrak/menyewah lokasi wisata. Hal ini tidak dapat dilakukan karena masyarakat sekitar kekurangan modal sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut, Duarte Alonso & Liu, (2013) bahwa salah satu kendala utama masyarakat

perdesaan dalam mengelola obyek wisata adalah ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan kondisi ini masyarakat setempat tidak dapat berbuat banyak, karena tidak mempunyai hak untuk menuntut kepada pemilik lahan.

Untuk itu, maka masyarakat setempat tidak dapat melakukan usaha di dalam obyek wisata, mereka terpaksa membuka usaha di luar obyek. Menurut penuturan berbagai informan bahwa pada awalnya sejak pertama kali pariwisata dibuka masyarakat setempat telah aktif didalamnya, terutama yang dekat dengan tempat tinggalnya, tetapi setelah dilarang oleh pemilik lahan, akhirnya mereka membuka usaha di luar obyek. Hal ini berpengaruh langsung pada penghasilan masyarakat setempat. Penghasilan mereka ketika mengelola langsung dan tidak mengelola langsung obyek wisata sangat jauh berbeda. Biasanya jika mereka mengelola langsung obyek wisata, pendapatan mereka sangat baik, tetapi ketika mereka membuka usaha di luar obyek wisata maka pendapatan mereka sangat minim. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebutuhan wisatawan telah disediakan dalam obyek wisata, mulai dari penginapan, restroran, warung makan sampai pada makan dan minuman ringan.

Dengan kondisi ini maka warga setempat hanya dapat melayani kepentingan wisatawan ketika berada di luar obyek. Pada berbagai kesempatan ketika wisatawan berkeliling diberbagai tempat di Pulau Wangi-Wangi, mereka dapat menikmati berbagai kuliner lokal dan membeli berbagai aksesoris khas Wakatobi. Peluang inilah yang digunakan oleh penduduk sekitar untuk menjajakan dagangannya kepada para turis. Menurut penurutan berbagai informan bahwa mereka sangat senang ketika melihat wisatawan berkeliling di kampung mereka, karena para wisatawan dapat membeli berbagai dagangan yang mereka tawarkan. Yang paling diminati oleh para wisatawan adalah kuliner lokal, seperti ikan parende, ikan *palumara*, *kasoami*, dan *kue karasi.*

Sementara itu, pemilik lahan dalam pengelolaan obyek wisata miliknya dapat ditempuh dengan dua cara; (1) dikelolanya sendiri oleh pemilik lahan, dan (2) dapat dipercayakan kepada pihak lain. *Pertama*, apabila obyek wisata tersebut langsung dikelola sendiri oleh pemilik lahan maka berbagai sarana dan prasarana obyek wisata, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan wisatawan menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Selain itu, pengembangan daya tarik wisata atau atraksi wisata juga dapat dikembangkan sendiri oleh pemilik lahan.

Kedua, apabila dipercayakan pada pihak lain ada dua macam. Yang *pertama* adalah dipercayakan kepada kerabatnya, dan *kedua* disewakan kepada pihak lain. Obyek wisata yang dipercayakan kepada kerabatnya biasanya tidak disertai dengan perjanjian kontrak, tetapi dengan modal kepercayaan. Dengan modal kepercayaan sehingga dapat mengelola obyek wisata. Apabila disuatu saat nanti si pemilik lahan membutuhkan lokasinya maka pengelola dengan suka rela mengembalikan lokasi yang digunakan tersebut kepada sang pemilik. Biasanya sebelum obyek wisata dikelola, pemilik lahan berpesan agar menjaga keindahan, kebersihan obyek wisata dan tidak merusak lingkungan yang ada di sekitarnya.

Yang *kedua* apabila disewakan kepada pihak lain maka dapat memenuhi sejumlah perjanjian. Perjanjian tersebut berupa waktu penyewaan, keamanan, kenyaman wisatawan, kebersihan obyek wisata, harga sewa dan daya tarik obyek wisata dan berbagai perjanjian lainnya. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pemilik lahan yang berinisial SR bahwa "lahan saya yang dipinggir pantai saya sewakan kepada pihak lain dengan sejumlah perjanjian dan sampai saat ini masih dikelola oleh orang tersebut". Contoh lain misalnya, obyek wisata Pantai Cemara yang disewakan pada pihak lain, dengan sejumlah perjanjian. Setelah selesai masa waktu kontrak, maka perjanjian dapat

dibicarakan kembali apakah dapat diperpanjang atau tidak.

Jika obyek wisata disewakan kepada pihak lain maka segala fasilitas yang ada di dalamnya dibuat oleh penyewah. Misalnya fasilitas air bersih, penerangan, gazebo, penyewaan alat *snorkeling* dan *diving* dan berbagai fasilitas lainnya. Namun dengan pengelolaan seperti ini fasilitas dalam obyek wisata biasanya sangat minim. Mereka hanya membuat fasilitas yang sifatnya temporer, karena apabila telah habis masa kontrak maka dapat dibongkar kembali, berbeda dengan obyek wisata yang dikelola langsung oleh pemilik lahan, fasilitas di dalamnya cenderung lengkap dan segala kebutuhan wisatawan tersedia. Misalnya, jika pengelolaan oleh pihak lain maka, di dalam obyek wisata tidak dibuat penginapan atau bangunan yang sifatnya jangka panjang, tetapi jika dikelola langsung oleh pemilik lahan, maka mulai fasilitas yang sifatnya temporer dan jangka panjang telah tersedia. Untuk itu, jika mengunjungi suatu obyek wisata, sementara fasilitas yang ada di dalamnya sangat minim boleh jadi fasilitas tersebut dikelola oleh pihak lain, tetapi jika fasilitas yang ada di dalamnya cenderung lengkap maka dapat dipastikan bahwa obyek wisata tersebut, dua kemungkinan dikelola langsung oleh pemilik lahan atau obyek wisata tersebut milik pemerintah.

Para penyewah dapat melakukan berbagai jenis usaha, seperti membuka warung kopi, menyewakan alat *snorkeling* dan *diving*, warung makan, menyewakan ban untuk renang, menyediakan *babana boat* dan berbagai jenis usaha lainnya. Berbagai jenis usaha seperti ini sifatnya temporer, apabila pemilik lahan tidak berkenaan memperpanjang kontrak, maka dapat saja membongkar falisitas yang ada dan dipindahkan ketempat yang lainnya. Jadi, para penyewa tidak mau mengambil resiko yang besar, misalnya, membuat *home stay* atau penginapan maka resikonya sangat berat karena harus membongkar bangunan tersebut. Hal ini akan mendatangkan kerugian besar bagi pengontrak. Namun biasanya, ada juga obyek wisata yang disewahkan kepada pihak lain, dalam perjanjian memasukkan poin bahwa tidak bisa membuat gedung permanen, karena apabila masa kontrak telah habis dan tidak dapat diperpanjang kembali maka pengontrak harus membongkar sendiri bangunan tersebut atau cara lain sesuai hukum yang berlaku.

Tipe Pengelolaan Obyek Wisata oleh Pemerintah

Pengelolaan obyek wisata yang ditangani oleh pemerintah melibatkan langsung masyarakat setempat. Masyarakat setempat dapat melakukan berbagai usaha di dalamnya, mulai dari usaha membuka usaha kuliner lokal, rumah makan, warung kopi, kerajinan atau soufenir, makanan dan minuman ringan sampai pada penyewaan alat renang dan alat selam. Dalam membuka berbagai jenis usaha masyarakat setempat tidak dipungut retribusi, asalkan mereka dapat menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan pengunjung. Menurut pengakuan berbagai informan, bahwa mereka sangat senang diizinkan untuk membuka berbagai jenis usaha dalam obyek wisata, asalkan semua persyaratan dari pemerintahan dipenuhi. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, maka tugas-tugas seperti keamanan dan kebersihan obyek wisata menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat setempat. Berbeda dengan pengelolaan obyek wisata yang dikelola oleh pemilik lahan, masyarakat setempat hanya dapat membuka usaha di luar obyek wisata, sementara obyek wisata yang ditangani langsung oleh pemerintah masyarakat setempat sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan obyek wisata.

Dengan model pengelolaan tersebut tentunya pendapatan masyarakat dari hasil usaha juga berbeda. Masyarakat yang melakukan usaha di dalam obyek wisata tentunya lebih besar pendapatannya bila dibandingkan dengan masyarakat yang

membuka usaha di luar obyek wisata. Seperti yang dikatakan beberapa informan yang berusaha di luar obyek mengatakan bahwa, hasil usaha yang mereka peroleh sangat sedikit bila dibanding dengan membuka usaha di dalam obyek wisata, sementara beberapa informan yang membuka usaha di dalam obyek wisata mengatakan bahwa mereka mendapatkan hasil yang banyak dan langsung melayani wisatawan. Namun demikian dengan dibukanya pariwisata di Pulau Wangi-Wangi dapat menciptakan berbagai peluang usaha sehingga masyarakat setempat dapat membuka berbagai jenis usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yergeau, (2020) bahwa dengan adanya pariwisata maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal (*guest*) dengan adanya pariwisata yaitu, kenaikan harga, pengaruh eksternal dengan adanya wisatawan, peningkatan sumberdaya di sektor manufaktur dan peningkatan peluang usaha selain periwisata (Chao et al., 2004 ; Urtasun & Gutiérrez, 2006).

Selanjutnya, keterlibatan pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan adanya pengelolaan Pariwisata model CBT adalah membuat berbagai fasilitas, sarana dan prasarana obyek wisata, mulai dari infrakstruktur jalan, air bersih, penerangan, MCK, dan berbagai fasilitas lainnya dibuat oleh pemerintah. Berbagai obyek wisata yang ditangani langsung oleh pemerintah, antara lain Pantai Marina yang terletak di Kelurahan Wanci, Pantai Sausu yang terletak di Desa Sausu, dan Puncak Toliamba terletak di Desa Waginapo. Diantara obyek wisata yang ditangani oleh pemerintah Pantai Marina yang banyak dikunjungi wisatawan lokal, domestik dan internasional, sekaligus dapat dijadikan sebagai pusat rekreasi dan pusat kegiatan masyarakat setempat. Sementara itu, masyarakat setempat langsung dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata sehingga langsung melayani kepentingan wisatawan, sementara masyarakat setempat yang berada di luar obyek wisata, mereka tetap pada profesinya masing-masing, entah itu menjadi nelayan, pedagang atau melakoni berbagai profesi lainnya sesuai dengan keahliannya.

Yang menjaga berbagai fasilitas dalam obyek wisata adalah masyarakat dan aparat penerintah setempat. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas yang ada karena keterbatasan aparat dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi. Dengan demikian, warga yang ada di sekitar obyek wisata selain membuka berbagai jenis usaha juga mengaja dan merawat fasilitas yang ada. Seperti yang dikatakan oleh beberapa informan yang membuka usaha di dalam obyek wisata di Pantai Marina bahwa selain menjual berbagai kebutuhan pengunjung juga menjaga dan merawat fasilitas yang ada di tempat itu, sehingga terhindar dari ulah dari oknum yang ingin merusak keindahan tempat itu. Dikatakan pula oleh Kepala Bagian Pemasaran, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kereatif bahwa selain keterbatasan aparat, juga dapat memberdayakan masyarakat setempat, karena dalam kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi yaitu pariwisata berbasis masyarakat. Jadi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sangat besar karena keterbatasan aparat dari pemerintah dalam merawat berbagai fasilitas tersebut.

Selain itu, keterlibatan pemerintah Kabupaen Wakatobi dalam pengelolaan pariwisata dengan model CBT, baik model CBT tipe pertama, maupun CBT tipe kedua adalah membuat regulasi dan melakukan berbagai sosialisasi ataupun pelatihan untuk pengembangan dan kemajuan pariwisata. Misalnya pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan kelembangan pariwisata, perizinan dan lain sebagainya. Pelatihan pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan mengenai pemandu selam, pemandu wisata budaya, pemandu wisata warisan budaya dan lain sebagainya.

Memfasilitasi pembuatan organisasi kepariwisataan lokal, seperti pembuatan LSM berbasis pada kelestarian lingkungan, LSM yang dapat menjaga kelestarian terumbu karang dan lain sebagainya. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi pemerintah dalam pengembangan pariwisata sangat dominan. Seperti halnya di China pemerintah telah melakukan intervensi terhapat perusahaan pengelolaan pariwisata untuk mengontrol perkembangan positif sektor pariwisata di negara tersebut. Semua kebijakan pariwisata dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan kebijakan privat pariwisata yang dikeluarkan oleh perusahaan pengelola pariwisata hasus sepengetahuan pemerintah untuk memastikan pelayanan yang maksimal kepada para wisatawan (Wang & Xu, 2011).

Selanjutnya, seperti dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwasata dan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Wakatobi bahwa regulasi yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pariwisata dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Jadi, segala sesuatunya yang terkait dengan aturan dalam pengelolaan pariwisata berdasarkan pada peraturan yang ada, sehingga dalam pengelolaan terarah untuk mencapai tujuan bersama yakni pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan yang berbasis pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Berbagai negara di dunia sangat berperan penting untuk keberhasilan pariwisata. Misalnya yang dilaporkan oleh, Liu et al., (2020), di Tiongkok bahwa pemerintah Tiongkong dari pusat sampai ke daerah memegang peranan penting dalam pengelolaan pariwisata, bahkan pemerintah terjun langsung dalam pengelolaan pariwisata. Dalam pengelolaan pariwisata juga melakukan koordinasi dengan pebisnis lokal untuk memberikan layanan dan memecahkan masalah bisnis mereka. Dengan keterlibatan langsung pemerintah dalam pengembangan pariwisata di pedasaan sehingga pariwisata di negara itu berkembang dengan pesat. Bahkan diberbagai negara seperti Korea Selatan, Jepang dan Thailand pemerintah setempat ikut memasarkan kuliner halal di situs resmi mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menarik wisata muslim agar berwisata di negara mereka. Dengan metode ini maka wisata halal yang digaungkan oleh pemerintah dinegara tersebut berkembang dengan pesat (Yousaf & Xiucheng, 2018).

Pengawasan dalam Obyek Wisata

Pelaksanaan pengawasan dengan model CBT di Pulau Wangi-Wangi ada 2 (dua) mekanisme, yakni (1) dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Dalam pengawasan pemerinthan melakukanya sendiri tanpa ada keterlibatan dari pihak manapun, dan (2) dilaksanakan oleh pemeritah dan masyarakat setempat. Pengawasan dengan cara ini yakni pemerintah dan masyarakat setempat secara bersama-sama melakukan pengawasan.

Pemerintanya daerah (Pemda) secara berkala melakukan pengawasan terhadap obyek-obyek wisata, baik itu yang dikelolah oleh para pemilik lahan maupun yang ditangani langsung oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pangelolaan pariwisata berjalan sesuai aturan yang ada. Berbagai hal yang diawasi terkait dengan bagaimana administrasi dijalankan, kebersihan obyek wisata, kelestarian lingkungkan, bagaimana kondisi karyawan dan lain sebagainya. Pengelolaan pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik apabila penanganan adminstrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penataan administrasi penting untuk memudahkan dalam mengorganisir data atau arsip dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini memudahkan orang mencari berkas ataupun arsip yang diperlukan. Selanjutnya, mengenai kebersihan pantai. Wisatawan tidak merasa nyaman ketika berada di suatu obyek wisata jika di sekelilingnya kotor atau penuh dengan limbah. Wisatawan akan berali ke obyek yang lain sesuai yang diinginkannya dan kemungkinan tidak akan kembali lagi ketempat itu untuk berwisata.

Selain itu, kondisi lingkungan yang asri, lingkungan yang indah dapat membuat betah wisatawan, bahkan apabila merasakan kenyamanan kemungkinan besar akan tinggal lama di tempat itu, tetapi sebaliknya, bila ia merasakan kegerahan kemungkinan besar mencari tempat lain yang lebih nyaman. Menurut Dahuri 2003 dalam, Sumarmi et al., (2021:125) bahwa diperlukan perencanaan yang matang terkait dengan kelestarian lingkungan karena terkadang masyarakat sekitar kurang pengetahuan tentang wisatawan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, faktor yang terpenting lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah kesejahteraan karyawan. Dalam pengawasan yang diperhatikan adalah kesejahteraanya, atau kecukupan gaji dan kebutuhannya. Hal ini penting karena terkait dengan kualitas pelayanan. Jika karyawan tidak diperhatikan kesejahteraannya kemungkinan dalam pelayanan juga kurang maksimal, tetapi jika gaji yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan maka pelayanan pun juga maksimal. Menurut Dickson & Huyton, (2008) bahwa kepuasan karyawan atau staf berkolerasi langsung dengan kepuasan dalam pelayanan. Hal ini sesuai hasil penelitiannya mengenai pelayanan pada wisata olahraga salju di Ausralia bahwa ada hubungan antara kepuasan karyawan atau staf dan kepuasan pelanggan dalam pelayanan. Apabila pendapatan tidak memuaskan dapat berpengaruh pada pelayanan yakni pelayanan kurang maksimal, tetapi apabila karyawan puas dengan apa yang didapatkan maka pelayanan juga maksimal.

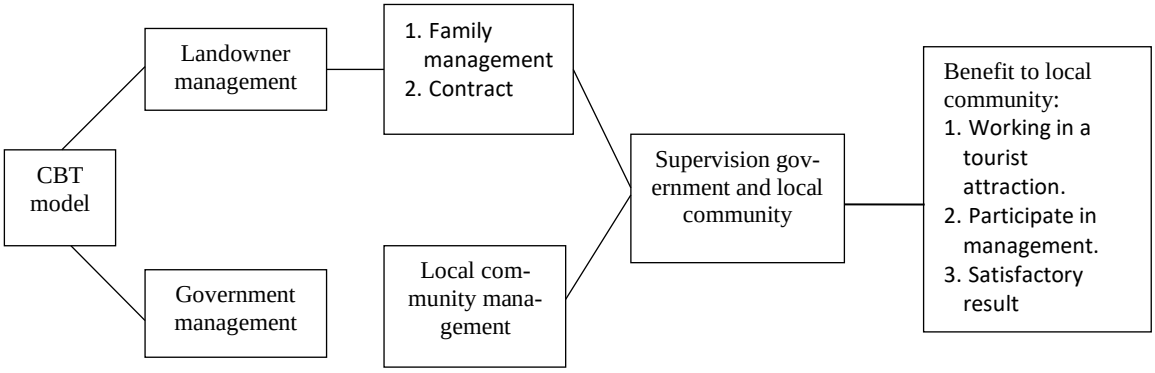
Selanjutnya, terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Wakatobi terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Pulau Wangi-Wangi yakni melakukan pengawasan walaupun itu pengelolaan obyek wisata tersebut tidak secara langsung ditangani oleh Pemda. Sementara, obyek wisata yang ditangani langsung oleh Pemda pengawasannya dilakukan secara bersama-sama yaitu Pemda bersama dengan masyarakat yang membuka usaha di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan seperti menjaga obyek wisata, kebersihan pantai, ikut menjaga keamanan, kenyamanan wisatawan, sementara keterlibatan Pemda, seperti mengangkut sampah, menjaga keteraturan para pedagang, memastikan kebersihan pantai, memastikan keamanan dalam obyek wisata dan lain sebagainya.

Manfaat yang Diperoleh Masyarakat Setempat

Manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya pengelolaan pariwisata dengan model CBT, baik langsung maupun tak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di Pulau Wangi-Wangi. Bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan obyek wisata maka secara langsung dapat merasakan hasilnya, bagitupun juga yang tidak berpartisipasi langsung dalam pengelolaan obyek wisata juga merasakan hasilnya. Bagi masyarakat yang merasakan langsung manfaat adalah yang membuka berbagai usaha dalam obyek wisata, sehingga mereka dapat menerima dan melayani kepentingan wisatawan, sementara bagi mereka yang tidak terlibat secara langsung atau tidak melakukan usaha dalam obyek wisata, dapat membuka berbagai usaha di luar obyek wisata, sehingga turut pula melayani kepentingan wisatawan. Misalnya, mereka yang mempunyai hotel, hampir semua hotel didirikan di luar obyek wisata. Mereka ini adalah tidak terlibat langsung dengan pengelolaan obyek wisata tetapi menyediakan hotel untuk tempat menginap wisatawan. Begitupun juga rumah makan, *souvenir*, dan tokoh, supermarket dan sebagainya berada di luar obyek wisata. Seperti yang dikatakan oleh berbagai informan bahwa walaupun masyarakat tidak membuka usaha dalam obyek wisata, tetapi mereka turut pula merasakan hasilnya, karena dapat membuka berbagai usaha di luar obyek wisata, bahkan hasil yang diperoleh lebih besar bila dibanding dengan yang mengelola obyek wisata. Yang mengelola obyek wisata pantai misal-

nya, kebanyakan hanya menyediakan berbagai perlengkapan *snorkeling*, *dive*, makan dan minum, sementara untuk kepentingan menginap dan mendapatkan kebutuhan lainnya pada umumnya diperoleh di luar obyek wisata. Jadi, kekurangan yang terdapat dalam obyek wisata dapat diperoleh di luar obyek. Seperti inilah hasil yang diperoleh masyarakat dengan model pengelolaan CBT di Pulau Wangi-Wangi.

Dengan demikian bahwa pengelolaan pariwisata dengan model CBT dapat memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk membuka berbagai jenis usaha, baik itu dalam obyek wisata maupun di luar atau baik langsung maupun tak langsung, sehingga dengan keterlibatan masyarakat demi untuk pelayanan wisatawan, sehingga hasilnya pun dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Secara ringkas model pengelolaan CBT di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. *Model of Community-based Tourism Mana-gement in Wangi-Wangi, Wakatobi*

KESIMPULAN

Penerapan model pengelolaan pariwisata model CBT di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dapat dilakukan dengan dua tipe, yakni pengelolaan obyek wisata oleh pemilik lahan dan pengelolaan obyek wisata oleh pemerintah. Pengeloaan obyek wisata yang dilakukan pemilik lahan masyarakat setempat tidak secara langsung terlibat di dalamnya, sementara pengelolaan oleh pemerintah masyarakat setempat terlibat langsung di dalamnya. Berbagai fasilitas, sarana dan prasarana dalam obyek wisata, masing-masing didirikan oleh pengelola yakni didirikan oleh memilik lahan dan pemerintah, apabila itu milik pemilik lahan maka didirikan oleh pemilik lahan, tetapi jika itu dikelola oleh pemerintah maka didirikan oleh pemerintah. Pengawasan dengan model CBT dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemilik lahan dan masyarakat setempat. Manfaat yang diperoleh masyarakat setempat dengan model CBT baik yang langsung terlibat dalam pengelolaan maupun tidak, dapat menikmati hasilnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada semua pihak disampaikan penghargaan yang tinggi atas kontribusinya sampai terbitnya tulisan ini, terutama kepada tim promotor, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lingkungan Hidup dan Perhubungan, Kabupaten Wakatobi yang banyak membatu selama di lokasi penelitian. Terima kasih pula kepada para informan dan *stakeholders* yang telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data lapangan. Ucapan yang sama kepada tim redaksi yang tak henti-hentinya memberikan

koreksi dan masukan sehingga tulisan ini layak untuk diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa-Putra, H. S. (2016). *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos, dan Model* (Kedua). Gadjah Mada University Press.

Ariyani, R. T. (2019). *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komnitas (Studi pada Kelompok Nelayan Ikan Hias Samudera Bakti di Pantai Bangsring Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi)*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Asuhadi, S., Amir, A. B., & Sarira, N. H. (2021). Desain memories planting Wakatobi sea bamboo di areal combbity garden untuk mendukung ekowisata wakatobi memories planting design of wakatobi sea bamboo in combbity garden area to support wakatobi ecotourism. *Bahari Papedak*, *2*(2), 131–140.

Beard, L., Scarles, C., & Tribe, J. (2016). Mess and method : Using ANT in tourism research. *Annals of Tourism Research*, *60*, 97–110. https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.06.005

Bello, F. G., Carr, N., & Lovelock, B. (2016). Community participation framework for protected area-based tourism planning. *Tourism Planning and Development*, *13*(4), 469–485. https://doi.org/10.1080/21568316.2015.1136838

Bittar Rodrigues, C., & Prideaux, B. (2018). A management model to assist local communities developing community-based tourism ventures: a case study from the Brazilian Amazon. *Journal of Ecotourism*, *17*(1), 1–19. https://doi.org/10.1080/14724049.2017.1309045

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025, Pub. L. No. 4 Tahun 2017 (2017).

Chao, C. C., Hazari, B. R., & Sgro, P. M. (2004). Tourism, globalization, social externalities, and domestic welfare. *Research in International Business and Finance*, *18*(2), 141–149. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2003.12.001

Dann, G., Nash, D., & Pearce, P. (1988). Methodology in tourism research. *Annals of Tourism Research*, *15*(1), 1–28. https://doi.org/10.1016/0160-7383(88)90068-0

Darsana, I. W., Sendra, I. M., Adikampana, I. M., & Mahagangga, I. G. O. (2017). Model Pengelolaan Wisata Bahari Berkelanjutan Di Pulau Nusa Penida , Kecamatan Nusa Penida. *Jurnal Analisis Pariwisata*, *17*(1), 10–16.

Delvi, A. (2020). *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus : Wisata Pemandian Alam Batang Tabik, Nagari Sei. Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Universitas Andalas.

Dewanti, A. M. (2014). Analisa Pola Partnership Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2014. *Journal of Politic and Government Studies*, *3*(4), 61–75. https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2013.06.007

Diarta, I. G. P. dan I. K. S. (2013). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Andi.

Dickson, T. J., & Huyton, J. (2008). Customer service, employee wel fare, and snowsports tourism in Australia. *International Journal of Contemporary Hospitality Mana gement*, *20*(2), 199–214. https://doi.org/10.1108/09596110810852177

Duarte Alonso, A. A., & Liu, Y. (2013). Local community, volunteering and

tourism development: The case of the blackwood river valley, western Australia. *Current Issues in Tourism*, *16*(1), 47–62. https://doi.org/10.1080/13683500.2011.644770

Giampiccoli, A., & Kalis, J. H. (2012). Community-based tourism and local culture: the case of the amaMpondo. *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, *10*(1), 173–188. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2012.10.017

Giampiccoli, A., Mtapuri, O., & Dłuzewska, A. (2020). Investigating the intersection between sustainable tourism and community-based tourism. *Tourism*, *68*(4), 415–433. https://doi.org/10.37741/T.68.4.4

Hadiyat, Y. D. (2014). ketidakmerataan pengetahuan digital di Indonesia. *Pekommas*, *17*(2), 81–90.

Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, *6*(1), 63–86. https://doi.org/10.24843/jumpa.2019.v06.i01.p04

Holden, A. (2013). Tourism and the Green Economy: A Place for an Environmental Ethic? *Tourism Recreation Research*, *38*(1), 3–13. https://doi.org/10.1080/02508281.2013.11081725

Jefferies, B. E. (1982). Sagarmatha National Park: the impact of tourism in the Himalayas. *Ambio*, *11*(5), 274–281. https://www.jstor.org/stable/4312819

Kurniasari, N., Ramadhan, A., & Lindawati, L. (2018). Dinamika Pengelolaan dan Kewibawaan Kelembagaan Adat (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Liya di Wakatobi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *7*(1), 1–11. https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i1.5747

Law, A., de Lacy, T., McGrath, G. M., Whitelaw, P. A., Lipman, G., & Buckley, G. (2012). Towards a green economy decision support system for tourism destinations. *Journal of Sustainable Tourism*, *20*(6), 823–843. https://doi.org/10.1080/09669582.2012.687740

Liu, C., Dou, X., Li, J., & Cai, L. A. (2020). Analyzing government role in rural tourism development: An empirical investigation from China. *Journal of Rural Studies*, *79*, 177–188. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.046

Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, *139*, 361–371. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024

Mayaka, M., Croy, W. G., & Wolfram Cox, J. (2019). A dimensional approach to community-based tourism: Recognising and differen tiating form and context. *Annals of Tourism Research*, *74*, 177–190. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.12.002

Nasikun. (2011). Model Pariwisata Pedesaan: Pemodelan Pariwisata Pedesaan untuk Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan. *Pelatihan Dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*.

Nimmo, R. (2011). Actor-Network Theory and Methodology: Social Research in a More-Than-Human World. *Methodological Innovations Online*, *6*(3), 108–119. https://doi.org/10.4256/mio.2011.010

Nuning Lisdiana, D. K. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Pariwisata Tretes Taman Tani di Desa Samiran Selo

Bayolali. *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, *7*(2), 53–59. https://doi.org/10.33579/rkr.v2i2.1476

Pan, S. Y., Gao, M., Kim, H., Shah, K. J., Pei, S. L., & Chiang, P. C. (2018). Advances and challenges in sustainable tourism toward a green economy. *Science of the Total Environment*, *635*, 452–469. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.134

Pantiyasa, I. W. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, *1*(2), 1–64.

Paunovic, I. (2015). Tourism and Hospitality Industry 2014, Congress Proceeding Trends in Tourism and Hospitality Industry. *Towards Green Economy: Balancing Market and Seasonality of Demand Indicators in Serbian Mountain Tourism Product Development*, 601–614.

Picard, M. (2016). *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Terjemahan oleh Jean Couteau dan Warih Wisatsana* (Edisi VII). Kepustakaan Populer Gramedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatan, Pub. L. No. 10 Tahun 2009, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2009).

Purnaya, I. G. K. (2017). Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Obyek Wisata Alas Kedaton. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, *7*(2), 121–132.

Ramadhani, R. (2017). *Management of Community Based Tourism (Case Study Tumpak Sewu Waterfall Sidomulyo village Pronojiwo Sub District Lumajang District)* [Universitas Jember]. http://repository.unimus.ac.id/411/

Ren, C., Jóhannesson, G. T., & van der Duim, R. (2012). How ANT works. In & G. T. J. R. van der Duim, C. Ren (Ed.), *Actor-network theory and tourism* (pp. 13–25). Routledge.

Ren, C. (2010). Assembling the socio-material destination: An actor-network approach to cultural tourism studies. In G. R. & W. Munsters (Ed.), *Cultural tourism research methods* (pp. 199–208). CABI Publications.

Smith, V. L. (2001). Sustainability. In V. L. S. and M. Brent (Ed.), *Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century*. Department of Anthropology, California State University.

Steinicke, E., & Neuburger, M. (2012). The Impact of Community-based Afro-alpine Tourism on Regional Development. *Mountain Research and Development*, *32*(4), 420–430. https://doi.org/10.1659/mrd-journal-d-11-00102.1

Suansri, P. (2003). *Community-Based Tourism. Hand Book*. Rest Project.

Sumarmi, S., Arinta, D., Suprianto, A., & Aliman, M. (2021). The development of ecotourism with Community-Based Tourism (CBT) in Clungup Mangrove Conservation (CMC) of Tiga Warna beach for sustainable conservation. *Folia Geographica*, *63*(1), 123–142.

Sumarni, Kurniawati, E., & Alimin, M. (2020). Community-based tourism (CBT) to establish a blue economy and improve public welfare for fishing tourism development in klatak beach, tulungagung, Indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, *31*(3), 979–986. https://doi.org/10.30892/gtg.31307-530

Thetsane, R. M. (2019). Local Community Participation in Tourism

Development: The Case of Katse Villages in Lesotho. *Revista de Turismo de Atenas*, *6*(2), 123–140.

Timothy, D. (1999). Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia. *Annuals Review of Tourism Research*, *26*(2), 371–391.

Urtasun, A., & Gutiérrez, I. (2006). Tourism agglomeration and its impact on social welfare: An empirical approach to the Spanish case. *Tourism Management*, *27*(5), 901–912. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.05.004

Vafadari, A. (2008). Visitor Management, the Development of Sustainable Cultural Tourism and Local Community Participation at Chogha Zanbil, Iran. *Conservation and Management of Archaeological Sites*, *10*(3), 264–304. https://doi.org/10.1179/175355209x452804

Violetta Simatupang, S. (2021). Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Bandung Selama Pandemi COVID 19. *Bina Wakya*, *15*(6), 4669–4680.

Wang, C., & Xu, H. (2011). Government intervention in investment by Chinese listed companies that have diversified into tourism. *Tourism Management*, *32*(6), 1371–1380. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.01.012

Yergeau, M. E. (2020). Tourism and local welfare: A multilevel analysis in Nepal's protected areas. *World Development*, *127*, 1–19. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104744

Yousaf, S., & Xiucheng, F. (2018). Halal culinary and tourism marketing strategies on government websites: A preliminary analysis. *Tourism Management*, *68*, 423–443. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.04.006